

Perkembangan Pendidikan Indonesia Pada Zaman Penjajahan II

Raffi Dian Alfarizi^{*1}, Kurnia Alfi Sholekhah², Heny Kusmawati³

^{1,2,3}*Sekolah Tinggi Agama Islam, Pati, Indonesia*

ABSTRACT: Education as one of the precepts in Ethical Politics, enabling the Indonesian people to experience formal education, like other nations. This paper aims to explain how the development of education in Indonesia during the colonial era II. This study uses historical research methods. In the early 20th century Indonesia used an ethical political system in education. Ethical politics for the Indonesian nation has a very important influence in the effort to win independence. Then in the period before the entry of Japan, the Dutch Colonial first entered Indonesia at the end of the 16th century, the first school in Ambon was founded by the VOC in 1607. The lessons provided were reading, writing and praying. In 1617 the first school was founded in Jakarta. Then the development of national education in the early 20th century Ki Hajar Dewantara founded Taman Siswa as a concrete manifestation of his words that education is a tool to fight for culture. Since its inception, Taman Siswa has carried the vision of educating the nation's life, departing from criticism of the schools established by the Dutch colonialists which only facilitated the sons and daughters of aristocrats. Then, the existence of education organized by the government in the form of state schools made several people's education foundations also organize educational programs in the form of private schools. Private schools are recorded as colonial education in Indonesia. Then in 1912 Kyai Haji Ahmad Dahlan founded the Muhammadiyah Organization, but before the official establishment of Muhammadiyah, the Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah school had already been established. In 1942 the pacific war began; Japan dominated the course of the war. The Dutch government in power in Indonesia (Dutch East Indies) surrendered unconditionally to the Japanese in 1942. To gain the sympathy of the Indonesian people, the Japanese leveled education in Indonesia. On the other hand, the Japanese government also increased physical training and shortened school study time to form an accumulation of volunteers. natives needed by the Japanese to gain victory in Greater East Asia.

Article History

Received: 27-07-2023

Accepted: 29-07-2023

Keywords

History, Education, Ki Hajar Dewantara.

Pendahuluan

Perkembangan baru dalam politik Belanda di Indonesia terjadi sekitar awal abad ke-20 politik baru yang perkembangannya berpedoman pada peningkatan kemajuan rakyat Indonesia. Politik baru tersebut disebut dengan *ethische politic* yang berarti politik haluan utama (Mulyono, 1968: 99). Sedangkan Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk bisa berproses dan berinteraksi di dunia luar dengan semua masyarakat sekitarnya. Pendidikan menurut salah satu tokoh yaitu M. J. Langeveld (1980), merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang yang dewasa untuk membantu mencapai kedewasaan seseorang terutama anak-anak yang masih belum dewasa. Pendidikan juga menjadi salah satu bekal terpenting di masa depan. Pendidikan sudah dikenal bahkan pada masa prasejarah namun pada saat itu sistem nya belum begitu memadahi dan hanya

CONTACT: Raffi Dian Alfarizi  staippiati@yahoo.com

© 2023 The Author(s). Published by Literasi Nusantara Publisher.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>), which permits non-commercial re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited, and is not altered, transformed, or built upon in any way.

menggunakan batu untuk alat tulis serta alam sebagai lingkungan pendidikannya. Lalu pendidikan terus berkembang sampai saat ini dimana banyak orang yang sudah bisa mendapatkan pendidikan tanpa mengenal batas usia, dan tanpa membeda bedakan antara ras, suku, bangsa serta agama dalam artian semuanya sama rata tanpa terkecuali.

Pendidikan saat ini secara umum mungkin sudah dilakukan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Pendidikan ini biasa kita kenal dengan istilah "sekolah" yaitu salah satu pendidikan formal yang ada di Indonesia. Sistem pendidikan yang dilakukan pun hampir keseluruhan menggunakan teknologi-teknologi canggih seperti komputer/laptop, LCD proyektor, handphone, WiFi, dsb. Berbeda dengan pendidikan pada zaman-zaman sebelum merdeka mulai dari pendidikan pada masa (penjajahan) Portugis, Belanda, Jepang, Masa Kemerdekaan, Orde Baru hingga Reformasi. Pendidikan di zaman penjajahan (sebelum merdeka) memang dikatakan tidak semua rakyat Indonesia mampu mengeyam jenjang pendidikan yang baik. Hanya rakyat Indonesia tertentu saja yang mampu mengenyam jenjang pendidikan seperti keturunan bangsawan (darah biru). Oleh sebab itu, selagi kita masih memiliki kesempatan mengenyam jenjang pendidikan yang lebih tinggi maka harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mampu merubah masa depan.

Metode

Metode atau langkah-langkah dalam pembuatan jurnal ini adalah dengan menggunakan metode studi pustaka atau studi literatur. Topik dalam pembuatan jurnal ini sudah ditentukan oleh dosen pengampu mata kuliah "Sejarah Pendidikan", sedangkan sistematika berikutnya mulai dari pembuatan judul, abstrak, pendahuluan, hingga pembahasan menggunakan literatur baca mulai dari e-book, buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lainnya. Dalam pembuatan jurnal ini juga menggunakan sistem pengumpulan informasi yang terpercaya (relevan) dengan topik pembahasan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Hasil dan Pembahasan

Pendidikan sudah wajib menjadi salah satu penentu masa depan seseorang. Dengan disusunnya visi dan misi yang akurat di dalam suatu ruang lingkup lembaga pendidikan tentunya dapat menjamin lembaga pendidikan tersebut mampu membentuk karakter individu yang menempuh pendidikan di dalamnya menjadi lebih baik dan bertanggung jawab dengan lingkungan sekitarnya. Visi dan Misi dalam suatu pendidikan harus memiliki sasaran yang jelas dan tanggap terhadap masalah-masalah bangsa. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan pendidikan suatu bangsa, maka pendidikan harus tetap berjalan dengan baik dari masa ke masa dengan Visi dan Misi yang jelas dan mampu menyeimbangkan di masa mendatang. Pendidikan sudah ada sejak masa sebelum kemerdekaan. Pertama, sistem politik menjadi landasan ketika Belanda datang ke Indonesia dengan menerima tanggung jawab politik etis demi kesejahteraan rakyat koloni mereka. Kedua, dibentuknya Taman Siswa oleh Ki Hajar Dewantara untuk mensejahterakan rakyat Indonesia yang tidak bisa mengenyam pendidikan dengan layak hanya karena mereka bukan dari kalangan pejabat tinggi, karena pada saat itu hanya mereka yang punya jabatan tinggi

yang mampu mengenyam pendidikan dengan layak. Ketiga, berdirinya Muhammadiyah oleh KH Ahmad Dahlan sebagai organisasi modern islam yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan keagamaan. Keempat, Masuknya Jepang ke Indonesia dan mengubah seluruh kebijakan yang sudah diterapkan oleh Belanda salah satunya adalah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pengantar pendidikan menggantikan bahasa Belanda. Serta banyak sistem pendidikan yang diubah oleh Jepang, contohnya Jepang menyeragamkan sekolah-sekolah dasar agar mudah diawasi. Tidak hanya itu Jepang juga menerapkan tingkatan pendidikan baru. Setelah sekolah dasar enam tahun (*kokumin gakko*), ada sekolah menengah pertama tiga tahun dan sekolah menengah tinggi tiga tahun. Tingkatan pendidikan ini bahkan dipakai sampai sekarang dan tahun mendatang.

Politik Etis

Politik Etis atau Politik Balas Budi dalam bahasa Belanda *Ethische Politiek* adalah politik pemikiran kolonial Hindia Belanda yang sekarang dikenal dengan nama Indonesia selama empat dekade dari 1901 sampai tahun 1942. Pada 17 September 1901, Ratu Belanda Wilhelmina mengumumkan bahwa Belanda menerima tanggung jawab politik etis demi kesejahteraan rakyat kolonial mereka. Pemikiran politik etis menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumi putera. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Munculnya kaum etis yang dipelopori oleh Pieter Brooshooft seorang wartawan Koran De Locomotief dan C.Th. van Deventer seorang politikus ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para bumi putera yang terbelakang.

Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda yang ditulis oleh Abraham Kuyper, perdana menteri yang baru menjabat (Heslam, Peter S, 2020: 297-317), bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi (*een eerschuld*) terhadap bangsa bumi putera di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tersebut ke dalam kebijakan politik etis, yang terangkum dalam program *Trias Van Deventer*. Namun, kebijakan pertama dan kedua disalah gunakan oleh Pemerintah Belanda dengan membangun irigasi untuk perkebunan-perkebunan Belanda dan emigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke daerah perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja rodi. Hanya pendidikan yang berarti bagi bangsa Indonesia.

Periode Politik Etis sebenarnya tergantung pada penaklukan militer dalam waktu yang bersamaan dengan itu, karena hanya ketika Hindia Belanda tergabung ke dalam satu entitas tunggal saja yang memiliki tujuan modernisasi sampai dapat dicapai. Di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal van Heutsz jaringan kereta api diperluas di Jawa dan Sumatera, monumen kuno seperti Candi Borobudur dipugar, dan kesempatan pendidikan diperluas selebar-lebarnya (Vickers, Adrian, 2011: 24-27). Politik Etis berakar pada masalah kemanusiaan dan sekaligus pada keuntungan ekonomi. Di Hindia Timur pada tahun-tahun permulaan abad ke-20, orang telah mulai bekerja mengembangkan semangat Politik Etis. Di abad ke-19, sebagian orang Belanda sudah mulai prihatin

terhadap kesejahteraan dan status pribumi. Van Deventer mendapat inspirasi untuk tulisannya didasarkan atas pandangannya terhadap politik penghisapan yang dilakukan oleh bangsa penjajah terhadap masyarakat Hindia-Belanda (Indonesia).

Ia menganggap bahwa masyarakat Hindia-Belanda sudah cukup mengalami penderitaan dalam upaya untuk memakmurkan perekonomian negara Belanda. Menurut Van Deventer, sudah saatnya pemerintah Belanda memperhatikan kemajuan rakyat jajahannya. Pemerintah Belanda harus menebus hutangnya kepada masyarakat pribumi dengan memberikan prioritas utama yaitu mensejahterakan mereka (Utomo, 1995: 13). Diawali dengan adanya kesadaran nasional yang pernah dicetuskan oleh R.A. Kartini, karena Kartini telah memasukkan mimpinya *nation bewustzijn* (kesadaran berbangsa). Oleh karena itu periode Kartini ini lebih tepat disebut "Awal Kesadaran Nasional". Sedangkan berdirinya Budi Utomo dapat disebut "Awal Pergerakan Nasional. Melalui pergerakan nasional inilah, akhirnya tercapai "Proklamasi Kemerdekaan Indonesia". Proklamasi inilah yang disebut sebagai puncak-puncak pergerakan nasional (Sudiyo, 2002: 17).

Sistem Pendidikan Kolonial Sebelum Masuknya Jepang

Belanda datang ke Pulau Jawa Indonesia untuk berdagang dan menciptakan kekuasaan baru setelah berakhirnya kekuasaan Portugis pada akhir abad ke-16. Belanda yang bergabung dalam badan perdangan VOC, menganggap bahwa agama Katholik yang disebarkan oleh Portugis perlu digantikan dengan agama Protestan yang dianutnya. Dengan itulah sekolah-sekolah keagamaan didirikan terutama di daerah yang dulunya telah terpengaruh agama Nasrani (Katholik) oleh Portugis dan Spanyol. Pada tahun 1617 sekolah pertama didirikan di Jakarta, lima tahun kemudian pada 1622 sekolah itu mempunyai murid 92 laki-laki dan 45 perempuan. Sekolah ini memiliki tujuan untuk menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang cakap sehingga dapat dipekerjakan di administrasi dan gereja pada pemerintahan.

Bahasa Belanda menjadi bahasa pengantar hingga tahun 1786. Pendidikan kejuruan mulai muncul sejak abad ke-19 dan pada abad ke-20 muncul golongan baru yaitu golongan cerdik, pandai yang mendapat pendidikan Barat, namun golongan ini tidak mendapat tempat dan perlakuan wajar dalam masyarakat kolonial. Partai yang timbul sesudah tahun 1908 ada yang berdasarkan Sarekat Islam, berdasarkan sosial seperti Muhammadiyah, ada pula berdasarkan asas kebangsaan seperti Indische Partij. Indische Partij merupakan pergerakan yang pertama kali merumuskan semboyan *Indie los van Nederland* yang berarti "Indonesia Merdeka" dan diambil alih oleh PNI (1928).

Taman Siswa

Pada tanggal 3 Juli 1922, Suwardi Suryaningrat atau dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah organisasi pendidikan alternatif yang diberi nama Taman Siswa di Kota Yogyakarta. Pendirian Taman Siswa dilatarbelakangi oleh kondisi Indonesia pada saat itu berada dibawah kolonialisme Belanda. Saat Indonesia dalam belenggu kolonial Belanda, tidak semua pribumi mendapat hak dibidang pendidikan karena yang dapat menempuh pendidikan hanya untuk masyarakat golongan atas, yakni golongan

keturunan Belanda dan golongan priyayi. Hal itu dikarenakan biaya untuk menempuh pendidikan sangat tinggi dan memang bagian dari politik kolonialisme Belanda. Pemerintah kolonialisme Belanda membatasi pendidikan bagi pribumi karena dikhawatirkan membahayakan posisi Belanda.

Banyak upaya untuk melakukan pembatasan yakni biaya pendidikan yang mahal dan sistem penilaian yang mementingkan intelektual. Para pelajar dituntut lulus dengan sistem ujian yang ketat sehingga tidak memperhatikan perkembangan diri dan mental. Para pelajar pribumi hanya belajar untuk mendapat ijazah dan nilai-nilai yang tinggi saja (Dyah Kumalasari, 2010: 49) Taman Siswa selalu menekankan prinsip nasionalisme dan kemerdekaan dalam pelaksanaan pendidikannya. Taman siswa juga bersifat non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Pendirian Taman Siswa sendiri sebagai bentuk perlawanan Ki Hajar Dewantara terhadap deskriminasi pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Taman siswa mengajarkan tentang dasar-dasar kemerdekaan bagi masyarakat Indonesia, ajaran kemerdekaan yang dimaksud Taman Siswa adalah kemerdekaan yang berasal dari diri sendiri.

Pendidikan di Taman Siswa selalu menekankan kepada siswanya untuk tidak bergantung kepada orang lain dan tetap berpegang teguh pada prinsip berdikari (berdiri di kaki sendiri). Dalam jurnal *Semangat Taman Siswa dan Perlawanannya terhadap Undang-Undang Sekolah Liar* (1994) karya Dwi Purwoko, keberadaan Taman Siswa menimbulkan rasa cemas di kalangan pemerintah Belanda. Pada tahun 1930, Belanda menerapkan *Wilde Scholen Ordonantie* atau Undang-Undang Sekolah Liar untuk membatasi perkembangan pendidikan alternatif Indonesia, termasuk Taman Siswa. Setelah UU Sekolah Liar berlaku, Belanda menutup seluruh kegiatan Taman Siswa dan membatasi seluruh gerak para Pengajar Taman Siswa. Namun, penutupan Taman Siswa tidak menghentikan aktivitas pendidikan Taman Siswa. Guru dan murid Taman Siswa tetap melanjutkan pendidikan dengan cara bergerilya atau sembunyi-sembunyi.

Taman Siswa menjadi salah satu sekolah partikelir (bukan milik pemerintah kolonial) dengan pengelolaan bidang pendidikan secara mandiri. Berdirinya Taman Siswa sebagai bentuk untuk menumbuhkan kesadaran akan kemerdekaan melalui pendidikan kebangsaan. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila saat zaman penjajahan sejalan dengan aktivitas pergerakan nasional pendidikan dijadikan sebagai program yang dijalankan disetiap organisasi sosial maupun politik. Berdirinya Taman Siswa memberikan harapan baru untuk kemajuan bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan, masa kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan. Perkembangan sekolah Taman Siswa yang didirikan pada tahun 1922 di Kota Yogyakarta, dengan meliputi 40 cabang, 3 diantaranya terdapat di wilayah Sumatera Timur dan 4 lainnya terdapat di Karesidenan Kalimantan Selatan dan Timur, dengan jumlah 5.140 orang.

Ibu Pawiyan di Yogyakarta terdiri dari sebuah MULO dengan jumlah murid 238, sekolah rendah dengan 362 murid dan Schakelschool dengan 97 murid. Pada sekolah rendah untuk pertama kalinya meluluskan murid sekitar 70% telah lulus ujian pegawai negeri rendah dan ujian masuk MULO (sekolah teknik). Kemudian diantara murid

Taman Siswa banyak yang melanjutkan pelajaran ke MULO atau Kweekschool yang didirikan pada 1924. Beranjak dari lulusan MULO di tahun 1928, 5 diantara 9 dan di tahun 1929, 6 diantara 14 telah lulus ujian masuk AMS dengan rata-rata 45%. Sekitar 24 lulusan dari Taman Guru mereka semua bekerja sebagai guru pada Taman Siswa atau lembaga partikelir lainnya (Poesponegoro, Mawarti Djoened 2010: 274)

Muhammadiyah

Muhammadiyah didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta sebagai organisasi modern Islam dan bergerak dibidang sosial, pendidikan, keagamaan. Dalam rangka tersebut, Muhammadiyah lalu mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, badan wakaf dan pengumpulan zakat, balai kesehatan, rumah yatim piatu, menyelenggarakan tabligh-tabligh Islam, penerbitan buku, brosur, majalah dan surat kabar. Muhammadiyah juga mengorganisir kegiatan kaum perempuan dalam organisasi Aisyah dan kaum muda dalam *Hizbul Wathan*. Baik KH. Ahmad Dahlan, maupun Ki Hadjar Dewantara sebagaimana telah dibahas sebelumnya, keduanya merupakan dua tokoh pendidikan yang telah lama mengembangkan konsep pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat Indonesia.

Sekolah muhammadiyah pada zaman Hindia Belanda masuk ke dalam kategori sekolah partikelir yang mana kyai Haji Ahmad Dahlan mempersiapkan untuk menjadi penengah adanya sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda. Saat itu, pemerintahan kolonial melarang mengajarkan mata pelajaran agama di dalam sekolah-sekolah bentukan kolonial karena, pendidikan bersifat sekuler meski ada misi menyebarkan agama kristen. Hal tersebut bisa disimpulkan bahwa sekolah Muhammadiyah didirikan atas nama yayasan (swasta) bukan tanggungan pemerintah sehingga, bantuan yang didapat sangat sedikit.

Pada mulanya, Kyai Ahmad Dahlan memperoleh pemikiran pembaharuan Islam berdasarkan berguru pada ulama-ulama ketika melakukan ibadah haji dengan istrinya. Ulama-ulama tersebut seperti syaikh Ahmad Syurkati yang merupakan pemimpin utama organisasi Al-Irsyad di Sebuah gerbong kereta api (Suwarno, 2019: 52). Kyai Haji Ahmad Dahlan untuk menguat tekadnya melakukan haji ke dua kali dimana yang pertama sebagai pengenalan gagasan pembaruan islam dan yang kedua mendalami bersama dengan alim ulama Minangkabau. Cita-cita Kyai Haji Ahmad Dahlan melaksanakan pembaharuan islam di Nusantara diwujudkan pada tanggal 18 November 1912 dengan berkomitmen mendirikan Organisasi Muhammadiyah (pic.it, 73). Faktor-faktor lahirnya muhammadiyah ada dua yaitu faktor internal dan eksternal yang diabil dari keterbelakangan dalam peradaban dan dunia pendidikan islam.

Faktor internal dari masalah yang ada di masyarakat islam Nusantara menjadi pandangan awal perlunya memurnikan amal pribadatan dari agama sebelumnya yang berkembang. Masyarakat Nusantara sangat dekat belum bisa terbebas dari kebiasaan tahayul ataupun tradisi yang bid'ah dan khufarat yang menjauhkan dari ajaran asli agama islam(M. Arif Syaifudi, dkk., 2019: 5) hal tersebut dibuktikan dengan kehidupan masyarakat yang

masih dalam kawasan keraton membuat belum bisa melaksanakan sikap beragama yang rasional. Disamping itu, faktor eksternal juga menjadi salah satu sebab lahirnya muhammadiyah yang mana adanya politik penjajahan kolonial belanda terutama di bidang pendidikan yaitu sistem pendidikan kolonial. Pada tahun 1924, muhammadiyah mendirikan lembaga pendidikan taman kanak-kanak di Kauman, Yogyakarta atas dasar keputusan Mukhtamar Aisyiah yang ke-2 yang menghendaki untuk didirikannya Frobelschool.

Sekolah yang dikenal dengan nama "Bustanul Aftal" atau yang memiliki makna "Kebun Kanak-kanak" ini didirikan oleh para ibu Aisyiah. Di sini diajarkan pendidikan agama Islam sebagai dasar dalam pertumbuhan mereka. Tahun 1918 didirikan sekolah yang dikenal dengan nama Standaardschool Muhammadiyah Kauman di Suronatan. Sebelumnya di Kauman telah ada ruang sekolah, akan tetapi karena keterbatasan ruang maka dipindah di Suronatan. Kemudian ruang sekolah di Kauman dialihfungsikan sebagai sekolah khusus perempuan yang dinamakan "Pawiyatan" yang setara dengan Volkschool. Kemudian didirikan sekolah lanjutan untuk Pawiyatan di Purwadiningratan yang dikenal dengan nama Meisies Kopschool Muhammadiyah Gading berlokasi di Purwodiningratan Yogyakarta.

Tahun 1920 dibuka HIS dengan nama "HIS met den Qur'an" yang harus ditempuh dalam waktu belajarnya 7 tahun dan masih ditambah lagi 1 tahun-sebagai Voorklas (Djohan Makmur, dkk., 90-92). Di Yogyakarta pada tahun 1930 sudah cukup banyak sekolah yang dikelola oleh Muhammadiyah, antara lain HIS sebanyak 3 sekolah, Standaardschool 5 sekolah, Vervolgschool 7 sekolah, Volkschool 83 sekolah, Volksonderwijzer 3 sekolah, Kweekschool (Sekolah Guru Agama) 2 sekolah, Schakelschool 1 sekolah, dan 1 Sekolah Tenun (Suwarno, 2016: 203). Ahmad Dahlan memiliki pemikiran tentang pembaharuan pendidikan yang direalisasikan melalui sistem pendidikan sekolah Muhammadiyah yang didirikan. Latar belakang munculnya pemikiran tersebut karena melihat kondisi pendidikan tradisional Islam yang ada di pesantren-pesantren memiliki kelemahan metodologi yang kurang relevan dengan perkembangan zaman serta tidak adanya mata pelajaran umum (Mu'thie, Abdul, 2015: 27)

Karakter dan Sistem Persekolahan Pada Masa Pendudukan Jepang

Sistem pendidikan yang diterapkan pada masa pendudukan Jepang difokuskan pada kebutuhan perang Jepang. Kala menguasai Indonesia, Jepang tengah menghadapi perang Asia Timur Raya. Menurut Murni Ramli dalam tulisannya yang berjudul *Primary School System in Java Before and Under Japanese Occupation (1940-1944)*, sekolah dasar di Indonesia pada masa pendudukan Jepang menekankan pendidikan praktis, tidak seperti sistem Belanda yang hanya membina dan memelihara sisi akademis (Detikedu). Sejak pendudukan Jepang, beberapa kebijakan yang sebelumnya berlaku, diubah. Pertama, bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi pengantar pendidikan menggantikan bahasa Belanda. Kedua, sistem pendidikan diintegrasikan. Pendidikan berdasarkan kelas sosial yang sebelumnya berlaku di era Hindia-Belanda dihapuskan.

Di masa pendudukan Jepang, pendidikan tingkat dasar hanya ada satu macam yakni sekolah dasar selama enam tahun. Jepang menyeragamkan sekolah-sekolah dasar di Indonesia agar mudah diawasi, hal ini berdampak positif. Anak-anak pribumi dari keluarga miskin yang sebelumnya tidak berhak untuk sekolah, jadi mengenyam pendidikan yang sama dengan anak bangsawan dan keturunan Belanda. Sekolah-sekolah berbahasa Belanda ditutup. Begitu juga materi pengetahuan soal Belanda dan Eropa. Jepang juga melarang berdirinya sekolah swasta baru. Sekolah swasta yang sudah telanjur berdiri harus mengajukan izin ulang agar bisa tetap beroperasi. Sekolah swasta baru yang boleh berdiri hanya sekolah di bawah kendali Jawa Hokokai. Jawa Hokokai adalah organisasi yang dibentuk Jepang untuk membantu perang. Sekolah swasta lainnya hanya boleh membuka sekolah kejuruan dan bahasa.

Taman Siswa yang didirikan Ki Hajar Dewantara diubah namanya. Taman Dewasa menjadi Taman Tani. Sementara Taman Guru dan Taman Madya tutup. Sementara terhadap pendidikan Islam, Jepang berusaha mengambil simpati dengan sering mengunjungi pesantren sambil membawa bantuan. Jepang juga menerapkan tingkatan pendidikan baru. Setelah sekolah dasar enam tahun (*kokumin gakko*), ada sekolah menengah pertama tiga tahun dan sekolah menengah tinggi tiga tahun. Jepang juga mengizinkan berdirinya Pembela Tanah Air (PETA) yang merupakan cikal bakal TNI. Jepang mewajibkan setiap siswa latihan disiplin militer keras seperti tentara Jepang. Siswa diwajibkan melakukan *kinrohosi* atau kerja bakti. Mereka diminta mengumpulkan bahan-bahan untuk perang, menanam bahan makanan, membersihkan asrama, dan memperbaiki jalan. Pelatihan ini ditujukan agar siswa memiliki semangat Jepang (*Nippon Seishin*). Mereka juga harus menyanyikan lagu kebangsaan Jepang Kimigayo, melakukan penghormatan untuk kaisar ke arah Tokyo, menghormati bendera Jepang Hinomaru, dan gerak badan taiso. (Kompas)

Simpulan

Dari pembahasan diatas dapat di simpulkan bahwa pendidikan sudah mulai ada saat zaman prasejarah dan semakin berkembang seiring berjalannya waktu, sampai akhirnya pada abad ke-20 dimana saat itu Belanda datang ke Indonesia dan bergabung dalam badan perdagangan VOC, lalu memberikan pendidikan guna untuk menjadikan rakyat pribumi sebagai pekerja di pemerintahan Belanda dengan gaji yang sangat kecil. Hingga pada akhirnya Ki Hajar Dewantara membentuk suatu kelompok yang diberi nama Taman Siswa, Taman Siswa tersebut guna untuk memberikan pendidikan yang layak kepada masyarakat pribumi agar mereka dapat mengenyam pendidikan tanpa harus membeda-bedakan antara rakyat jelata dan konglomerat, serta tidak membedakan dalam segi ras, suku, bangsa, bahasa, kedudukan, serta agama. Kemudian kedatangan Jepang menghancurkan segala upaya yang sudah di lakukan Belanda hingga pada akhirnya mereka menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Selama kependudukan Jepang sendiri banyak sekolah-sekolah yang di dirikan oleh Belanda di tutup dan diganti dengan pendidikan yang dianggap akan menguntungkan bagi mereka tidak hanya sampai disitu, Jepang juga mengubah seluruh kebijakan terutama bahasa Belanda diganti dengan bahasa Indonesia dan menjadikannya sebaga bahasa resmi

pengantar pendidikan. Jepang juga mengizinkan berdirinya Pembela Tanah Air (PETA) yang merupakan cikal bakal TNI. Jepang juga mewajibkan semua siswa latihan disiplin militer dengan keras seperti tentara Jepang. Siswa diwajibkan melakukan *kinrohosi* atau kerja bakti.

Referensi

- Heslam, Peter S. (2020). "An Ethical Policy for an Islamic People: The Colonial Policy of the Kuyper Cabinet (1901–1905) and the Challenge of Human Development". *Journal of Markets & Morality*. 23 (2): 297–317.
- Kumalasari, Dyah. (2010). "Konsep Pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan Taman Siswa (tinjauan humanis-religius)". *ISTORIA: Journal 1922-1959 (Ki Hajar Dewantara Role In The Struggle For National Education in 1922-1959)*.
- Mulyono, S. (1968). *Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia I*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mu'thi, Abdul. (2015) "KH Ahmad Dahlan. (1868-1923)". Jakarta: Museum Lebangkitan Nasional Direktorat Jendral Kebudayaan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Poesponegoro, Mawati Djoened. (2010) *Sejarah Nasional V*, Jakarta: Balai Pustaka
- Sudiyo, (2002). *Pergerakan Nasional Mencapai & Mempertahankan Kemerdekaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suwarno, (2019). *Kelahiran Muhammadiyah dari Persepektif Hermeneutik*.
- Syaifuddin, Muhammad, Arif, dkk. (2019). *Sejarah Sosial Pendidikan Islam Modern di Muhammadiyah*.
- Utomo, C.B. (1995). *Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia: Dari Kebangkitan Hingga Kemerdekaan*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Vickers, Adrian. (2011). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Insan Madani.
- (<https://www.detik.com>) Diakses pada 29 Mei 2023, pukul 13.17 WIB
- (<https://www.kompas.com>) Diakses pada 29 Mei 2023, pukul 13.19 WIB